
KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Aziz Taufik Hirzi
Universitas Islam Bandung
azizhirzi@yahoo.com

ABSTRAK

Komunikasi politik memberi ruang kepada setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya kepada para pemangku jabatan, baik kepada pemerintah maupun kepada para anggota parlemen. Komunikasi politik bisa lancar apabila setiap warga negara yang terlibat memahami benar persoalan yang dihadapi dan sekaligus mendapatkan perhatian pemerintah. Aspirasiwarga negara yang cerdas dan perhatian pemerintah yang luas, bisa membuat hubungan yang akrab di antara sesama warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah. Komunikasi ini dapat pula mengungkap rupa-rupa hal yang tersembunyi. Di negara demokrasi, sejatinya komunikasi politik itu berlangsung tertib, tidak ada kendala. Namun praktiknya tidak semudah yang dilisankan, bergantung pada pemegang kendali kebijakan dan kekuasaan yang seringkali mengutak-atik makna demokrasi berdasarkan penafsiran subjektif dan kepentingan. Di Indonesia misalnya, budaya tenggang rasa, gotong royong, toleransi, dan solidaritas sosial yang menjadi tradisi nenek moyang, seperti hiasan indah pemoles wajah, padahal apabila tradisi ini dipelihara, diterapkan, dan mewarnai komunikasi politik, maka para politisi tentu dengan kesantunannya akan mengedepankan kepentingan publik, bahkan dengan jiwa besarnya berani mengambil risiko dengan mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Berkait dengan paparan di atas, terurai beberapa bagian yang menjadi pembahasan, yakni tentang; pentingnya komunikasi politik dan kearifan lokal; peran komunikator politik dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal; sosialisasi komunikasi politik dalam bingkai kearifan lokal; dan tantangan eksistensi komunikasi politik.

Kata Kunci : Komunikasi, politik, kearifan, lokal

Pendahuluan

Secara bebas dan luas, komunikasi politik diartikan sebagai komunikasi yang memiliki konsekuensi mengatur perbuatan

manusia dalam kondisi konflik. Konflik dimaksud bisa perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, dan perbedaan gagasan. Dalam manajemen konflik, semua perbedaan itu bisa menjadi khazanah perbendaharaan pemikiran apabila semua perbedaan itu terakomodasi, teradaptasi, dan teraktualisasi. Tidak ada yang merasa terkalahkan dan memenangkan “pertandingan”. Semua merasa pas dan puas serta memperhatikan buah pikirannya. Selama pengelolaannya baik, selama itu pula berbagai kepentingan akan terasa *enjoydi* tengah keragaman.

Keragaman di negara mana pun tentu dipengaruhi oleh budaya. Budaya Timur, khususnya Indonesia yang dikenal ramah, suka gotong royong, tenggang rasa, toleran, dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi sangat mungkin mempengaruhi keputusan politik yang dibuat para pemilik wewenang keputusan tadi. Di samping itu, tidak tertutup kemungkinan sebagian aktivitas politik mencampakkan atau menyingkirkan tradisi yang arif itu dari proses dan keputusan politik, padahal dengan memperhatikan kearifan lokal, akan membuat para politisi benar-benar memahami dan menjalankannya dengan memperhatikan etika politik yang dapat diterima semua pihak. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Radmila, 2011:1). I Ketut Gobyah dalam Radmila (2011:1) mengatakan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Pandangan lain mengemukakan bahwa istilah kearifan lokal berasal dari kata *local genius* yang diperkenalkan Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 dengan arti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan” (Rosidi, 2011:29).

Apabila para politisi memperhatikan etika politik dan menyadari tentang latar belakang budayanya, tentu tindakan dan perilakunya akan sesuai dengan tradisi budaya tadi, tidak

terpengaruh budaya asing, khususnya Barat yang syarat dengan individualis, hedonis, dan mekanis. Di Indonesia, rakyat sangat berharap akan kualitas para politisi yang mampu membawa misi dan amanah. Kedekatan politisi dengan rakyat bisa memudahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya. Juga sekaligus memudahkan para politisi untuk menggali permasalahan di lapangan dan mengenal kondisi rakyat, terutama yang sedang bermasalah, apakah masalah ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan beberapa lainnya.

Harapan itu tidak semudah yang diucapkan. Boleh jadi para politisi tidak cukup waktu berinteraksi dengan rakyat, atau rakyat tidak peduli terhadap para politisi. Di negara demokrasi yang benar-benar menerapkan nilai demokrasi, hematnya komunikasi politik antara pemegang otoritas politik dengan rakyat berjalan lancar, karena rupa-rupa kebebasan, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan menuntut hak, terjamin. Berbeda dengan negara yang berbungkus demokrasi, apalagi totaliter/diktator, komunikasi politik hanya berlangsung satu arah dan sangat ditentukan para elite politik. Rakyat tidak dapat berbuat banyak, tidak memiliki kekuatan untuk menyampaikan berbagai harapan dan aspirasinya, kecuali mereka yang berani dengan segala konsekuensinya. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi para pihak, terutama bagi pecinta kebebasan dan pihak yang menginginkan peningkatan kualitas para politisi, baik dari sisi wawasan pengetahuan dan pengenalan medan, dedikasi, dan tanggungjawabnya terhadap rakyat pemilih. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara terbangun, sehingga yang memikirkan negara dan bangsa tidak saja para elite, tapi juga warga negara pada umumnya.

Komunikasi Politik dan Kearifan Lokal : Sebuah Harapan dan Tantangan

Pentingnya Komunikasi Politik dan Kearifan Lokal

Komunikasi Politik akan terasa semakin penting apabila kita menyimak dan menelusur fungsi komunikasi politik seperti yang

dikemukakan Mc.Nair dan Hedebro dalam Cangara (2007:40-41) yang meliputi :

- 1.1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat
- 1.2. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik
- 1.3. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai
- 1.4. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik
- 1.5. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara
- 1.6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau pengamat politik
- 1.7. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional
- 1.8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi
- 1.9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentar-komentar politik
- 1.10. Menjadi *watchdog* atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya *good governance* yang transparansi dan akuntabilitas

Kesepuluh fungsi itu sangat jelas membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-hak politiknyayang proporsional dan dijamin Undang-Undang, juga kepada lembaga politik, termasuk pemerintah untuk menyampaikan informasi

sejelas-jelasnya tentang segala kebijakan yang prorakyat. Tidak sekedar informasi, unsur pendidikan dan hiburan pun termasuk yang diperhitungkan. Demikian pula, partisipasi rakyat, terutama pemilik gagasan cemerlang, merupakan bagian yang tidak boleh terabaikan. Rakyat diajak bicara dan diberi kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran atau ide-idenya yang dapat membantu tugas para elite politik yang berada di “panggung”. Sangat terang, di sini menunjukkan bagaimana pentingnya komunikasi politik antara rakyat dengan pejabat dan pejabat dengan rakyat, karena tanpa komunikasi politik, boleh jadi partisipasi rakyat menjadi lemah atau apatis, atau pemerintah bisa kehilangan kontak dan komunikasi manakala pada saat tertentu pejabat pemerintah itu membuat keputusan.

Memperhatikan uraian di atas, kesepuluh fungsi itu akan berjalan baik, manakala para pihak, khususnya pejabat/pemilik otoritas menaati aturan/Undang-Undang dengan tertib dan sejujurnya. Penguasa/pejabat tidak haus dan rakus kekuasaan. Demikian pula rakyat tidak bertindak anarkhis. Pejabat memahami kehendak rakyat, dan rakyat mengikuti petunjuk dan arahan pejabat.

Dalam tradisi nenek moyang di Indonesia, komunikasi politik berwarna kearifan lokal itu tidaklah asing dan aneh, karena bangsa Indonesia terbiasa hidup dengan budaya kolektif, gotong royong, dan toleran. Selain itu, karena kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya (Radmila, 2007:7). Apabila kearifan lokal itu benar-benar mewarnai komunikasi politik, sangat terbuka bagi pelaku komunikasi politik untuk bekerja dan bertindak sebaik-baiknya. Mendahulukan kepentingan umum adalah bagian yang sering terungkap dalam tradisi masyarakat Indonesia. Kearifan lokal bisa menjadi landasan para politisi untuk melakukan *action* politik dan menuntun para politisi bertindak arif, karena yang dilakukan tidak semata-mata *action* dan hasil, tapi prosesnya yang menggunakan aturan yang disepakati, baku, dan syarat dengan nilai etika. Bangsa Indonesia telah memperlihatkan kemampuan “kearifan lokal”-nya

dalam menghadapi pengaruh yang datang dari luar yang dianggap sebagai tantangan (Rosidi, 2011:33).

Sebenarnya, pengaruh luar itu bisa diadopsi dan dihadapi dengan cermat dan teliti. Yang positif diambil, yang negatif dibuang. Dalam menghadapi pengaruh itu, di samping skill yang diperlukan, juga keberanian dan kejujuran yang bisa menimbulkan kepercayaan orang. Jujur terhadap aturan dan taat pada nilai etika, cenderung patuh terhadap aturan lembaga.

Perhatian terhadap aturan dan nilai etika, dapat membuka lebar dan jalan yang lurus bagi para pelaku komunikasi politik. Sebaliknya, yang lepas dari aturan dan nilai etika akan menimbulkan masalah yang kompleks, apakah terjadi kegoncangan politik, keserakahan politik, atau bahkan apatisisme politik. Yang untung, tentu para "srigala" penguasa/pejabat negara. Sementara rakyat bisa terpinggirkan, bahkan cenderung tidak diperhatikan. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap penguasa menjadi kurang, bahkan hilang sama sekali.

Peran Komunikator Politik dalam Menerapkan Nilai Kearifan Lokal

Komunikator politik dalam Nimmo (1989:32) dibagi menjadi tiga kategori; politikus (pols), komunikator profesional (pros), dan komunikator aktivis (vols). Politikus mencurahkan segala hidupnya untuk kepentingan bangsa melalui jabatan politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Politisi ini pun terbagi dua, wakil partisan dan ideolog; Profesional adalah orang/kelompok yang bekerja sesuai dengan profesinya, seperti jurnalis dan promotor terkait dengan kegiatan politik; Sementara aktivis, yang kegiatannya paruh waktu, terdiri atas jurubicara dan pemuka pendapat.

Terkait dengan kearifan lokal, para politisi tertantang untuk mengenal budaya setempat. Segala tindakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berkembang pada budaya setempat itu. Apabila dalam budaya leluhur, tingkat kepatuhannya tinggi, kandungan etikanya kental, maka pantas apabila para politisi itu menjalankan gerak politiknya penuh dengan kesantunan dan keteraturan. Kepatuhan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan

oleh umat beragama dan kepatuhan itu berhubungan dengan seorang pemimpin. Bagi umat beragama, kepatuhan kepada pemimpinnya adalah satu kewajiban Radmila, 2011:4).

Komunikasi politik sangat mungkin memainkan perannya sebagai agen perubahan yang bisa mengubah *mindset* masyarakat, terutama masyarakat awam, dari anggapan bahwa politik itu buruk, politik itu hanya mencari kekuasaan menjadi politik itu indah dan bisa memoles kekuasaan untuk kepentingan rakyat.

Budaya adiluhung, gotong royong, dan rasa kesetiakawanan yang merupakan budaya Timur, khususnya Indonesia, sekarang ini seperti lepas dari jangkauan politik dan perhatian para politisi, padahal budaya itu, apabila digunakan sebagai landasan berpolitik, sangat baik dan mampu mengendalikan perilaku politik para politisi yang senang bermain kayu, bermain api, dan suka memanipulasi keputusan dan melanggar komitmen. Dengan politik, tidak kurang para politisi seperti menghalalkan segala cara hanya untuk mengejar kekuasaan dan kepentingannya.

Untuk membangun citra positif tentang politik, memerlukan proses panjang dan berliku, karena masalah “tafsir politik” di kalangan masyarakat, bahkan di lapisan elite sekalipun, masih berragam, padahal bicara politik di berbagai referensi, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan bahwa politik itu buruk dan menakutkan atau kejam. Di sini para komunikator politik wajib memberikan pencerahan mengenai makna politik sesungguhnya. Pesan politik bisa disampaikan dengan tatap muka atau tidak langsung melalui media. Seorang politisi DPR atau pemerintah pantas apabila menyampaikan pernyataannya yang menyejukan masyarakat (persuasif), bukan menantang dan membuat galau (represif), karena pernyataan yang tidak menyenangkan akan membuat rakyat tidak simpati. Inilah yang sering diasumsikan masyarakat bahwa politik itu rumit, keras, dan syarat dengan kepentingan.

Komunikator lain yang tergolong kelompok profesional, seperti jurnalis, berkewajiban membantu menyampaikan informasi di media dengan memperhatikan kode etik jurnalistik dan nilai-nilai budaya setempat. Melabrak budaya setempat, akan dianggap sebagai

pelanggaran moral dan sama dengan tidak menghormati warisan leluhur. Lain di negara Timur, lain pula di negara Barat. Di negara Barat yang tingkat kemajuannya relatif cepat, paham liberalisme tumbuh subur, dan budaya setempat seperti pendamping setia yang siap mengikuti arus perubahan. Meski budaya masalampau dipelihara, tipi tidak sekental di negara Timur. Para jurnalis atau orang yang terlibat di media berkewajiban menyajikan informasi yang objektif, akurat, dan mendidik yang membuat rakyat percaya pada informasi yang terekspose di media itu. Jurnalis memiliki posisi strategis. Informasi atau beritanya ditunggu banyak orang, dan kehadirannya di dunia media sangat dibutuhkan. Dengan demikian, peran jurnalis, sangat membantu mencerdaskan massa atau sebaliknya, membuat massa resah dan geram atas berita di media. Bagaimana pun, dampak positif dari peran yang dimainkan para jurnalis adalah sesuatu yang diharapkan.

Sementara aktivis, meski kegiatannya paruh waktu, tidak bisa dianggap remeh. Mereka adalah relawan yang siap memenangkan “pertandingan” kandidat pada momen-momen pemilu. Relawan bertugas sebagai jurubicara untuk bisa menyampaikan informasi sebaik-baiknya kepada massa tanpa menyudutkan pihak lain. Informasi yang baik bisa berpengaruh pada simpati massa dan perolehan suara. Adapun relawan yang bertugas sebagai *opinion leader* (pemuka pendapat), berkewajiban membangun opini di media dengan konsep menarik dan memancing perhatian massa. Slogan persatuan, kebersamaan, toleransi dan saling menghargai adalah bagian dari ungkapan yang bernilai positif bagi masyarakat.

Sosialisasi Komunikasi Politik dalam Bingkai Kearifan Lokal

Komunikasi politik pantas tersosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya kalangan tertentu, elite yang merasakan, tapi kaum *alit* yang berada di bawah pun berhak merasakan, karena dengan komunikasi politik yang lancar antara masyarakat dengan pemerintah, anggota parlemen, atau partai politik, akan membuat rakyat menjadi tahu kondisi objektif lembaga itu dalam melakukan tugas-tugasnya, bahkan jika perlu, tahu pula

dengan anggarannya yang seringkali sensitif untuk diungkap. Keingintahuan itu tidak ditafsirkan intervensi, namun rakyat sebagai warga negara, wajar kalau tahu program dan anggarannya, sehingga rakyat menjadi paham dan kritis terhadap berbagai agenda itu. Dalam sosialisasi ini rakyat diberi penjelasan bahwa ;

1. Dengan komunikasi politik masyarakat menjadi lebih paham tentang makna politik yang sesungguhnya
2. Dengan komunikasi politik, masing-masing orang bisa mengoreksi dan membongkar kelemahan yang ada di rakyat dan juga pemerintah atau partai politik
3. Dengan komunikasi politik akan mengurangi ketegangan dan saling curiga antara masyarakat dengan penguasa.

Di samping itu, pihak berwenang memberi materi melalui simulasi mengenai bagaimana komunikasi politik yang berlangsung di masyarakat. Sosialisasi itu dilakukan bertahap/perlahan dan menyenangkan. Apriori terhadap sosialisasi ini akan membuyarkan harapan semua pihak, bahkan boleh jadi chaos, karena kekurangpahaman terhadap sosialisasi itu. Di dalam kehidupan dunia mana pun, terutama politik, chaos membayangi pikiran para elite/pelaku politik. Kecenderungannya terlihat dari fluktuasi yang kontras dan tidak teratur yang terlihat dari gagasan dan pemikiran para elite politik. Teori chaos seperti yang dikemukakan Stephen keller, didefinisikan sebagai : "Studi kualitatif tentang perilaku aperiodik yang tidak stabil dalam sistem dinamis non linier yang deterministik (Amien, 2005:83).

Bicara indonesia, tidak semua warga bisa menerima dan memahaminya. Sampai kini, masih ada yang mendengar kata politik seperti menakutkan, kontras dengan makna yang sebenarnya. Karena itu, sosialisasi perlu waktu dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat terkait dengan budaya. Sosialisasi yang dikemas dengan nilai-nilai budaya cenderung diterima, karena di dalamnya terdapat bahasa santun, damai, toleransi, dan solidaritas. Rakyat/massa dibawa ceritra ke "alam indah" di masa lampau terkait dengan kejujuran, keadilan dan kemakmuran, kemudian dihubungkan dengan situasi dan kondisi

masa *kiwari* yang memerlukan tenaga ekstra untuk menghadapinya, terutama mental keberanian dan kejujuran tadi, hingga pada saatnya masa tidak lagi apriori terhadap kata-kata politik, karena yang buruk itu bukan politiknya, melainkan para aktor politik yang melakukan *abuse of power*.

Sosialisasi itu tentu melibatkan berbagai pihak. Tenaga lapangan, tenaga ahli, tenaga penghubung, LSM, dan lain-lain yang siap mengemban tugas ini sebagai amanah yang mesti dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak terkait. Momen sosialisasi dapat dilakukan pada hari-hari libur dan hari besar seperti hari pendidikan nasional, HUT RI, hari Ibu, dan hari-hari lain yang mengundang banyak pengunjung. Sedangkan lokasi sosialisasi, bisa di rumah, sekolah, atau gedung yang dianggap memadai. Materi sosialisasi disesuaikan dengan tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan kondisi geografis, karena tidak mungkin materi sama antara masyarakat desa dengan masyarakat kota; antara yang berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah, antara rakyat biasa dengan para pejabat; antara yang tinggal di gedongan dengan di jalanan. Demikian pula metodenya pun tidak sama. Yang jelas tidak monolog, satu arah, dan asal-asalan.

Tantangan Komunikasi Politik dalam “perkawinannya” dengan Kearifan Lokal

Tantangan berat komunikasi politik dengan kearifan lokal adalah kompleksnya masalah dan lambatnya mencari/membuat solusi. Kompleksitas disebabkan oleh adanya keterkaitan (interkoneksi) yang intens antara berbagai “komponen” atau “bagian” sistem yang saling mempengaruhi di mana setiap “komponen” memiliki otonomi untuk bereaksi sesuai identitas masing-masing. Dengan pola keterkaitan seperti itu, kelakuan sistem menjadi tidak dapat lagi diprediksi dan bersifat nonlinier (Amien, 2005:95-96).

Sebenarnya kata kompleks tidak identik dengan kerumitan yang berkonotasi negatif, bahkan dengan kompleksnya masalah,

boleh jadi membuka kemungkinan gerak laju dan berkembangnya suatu lembaga, terakomodasinya berbagai kebiasaan dan budaya secara bertahap disertai dengan ketekunan dan kesabaran. Dalam sebuah teori disebutkan bahwa teori kompleksitas adalah sains baru tentang sistem-sistem kompleks, yaitu sistem yang terdiri atas sejumlah variabel yang saling berinteraksi antara satu sama lainnya dengan cara yang sangat berragam (Amien, 2005:95).

Sejumlah variabel yang berinteraksi serumit apa pun, bisa bersahutan, berpadu, dan berbaur. Caranya adalah dengan menghargai pandangan, jasa orang lain sekecil apa pun dan menurunkan ego masing-masing ketika memiliki hasrat manakala orang lain tidak respek alias tidak setuju, agar berbagai pandangan, gagasan, dan keinginan setiap orang bisa terakomodasi dalam menuju ke arah memperkuat dan mempertahankan budaya. Seandainya budaya politik adiluhung dianut oleh banyak pihak, terutama para politisi, tentu suasana politik yang kondusif bisa terpelihara. Warisan budaya leluhur yang mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan menjadi barang langka ketika pengaruh budaya asing menembus budaya lokal. Budaya asing, khususnya Barat yang menerapkan demokrasi liberal, membumbui demokrasi di Indonesia, sehingga tidak heran apabila peran para politisi di Indonesia atau siapa saja yang terlibat berperilaku seperti gaya Barat yang ternyata tidak cocok dan kebablasan, karena keliru menafsirkan. Kebebasan di Indonesia beda dengan kebebasan di Barat.

Pada masa reformasi, dengan udara kebebasan diharapkan ada peningkatan di segala bidang, ternyata tidak. Komunikasi politik yang semula menjadi ajang penumpahan unek-unek/aspirasi, berubah menjadi ajang perlombaan pembentukan partai politik. Dengan dalih pembela rakyat dan agen perubahan, para elite ramai-ramai mendirikan partai politik. Bukan suasana kondusif yang didapat, malah sebaliknya, menjadi penyaluran hasrat dan ambisi para elite yang berusaha merebut kekuasaan lewat pemilu. Kondisi ini tidak menciptakan perubahan yang signifikan, malah menimbulkan masalah baru yang berakibat kurang percayanya

rakyat kepada parpol, karena adanya anggota parpol, terutama yang duduk di parlemen tersangkut korupsi. Dengan adanya kasus ini, praktis rakyat merasa tidak ada gunanya menyampaikan aspirasi melalui partai politik dan anggota parlemen. Komunikasi politik tersendat karena wakil-wakil rakyat di parlemen terlalu sibuk dengan urusan dan masa depannya sendiri, dalam arti lebih mengedepankan ambisi pribadi dari pada membela rakyat. Budaya lokal yang penuh kearifan terlupakan, seperti ada penafsiran politik untuk politik dan budaya untuk budaya, artinya politik terpisah dari budaya. Apabila ini terjadi, perilaku para elite politik di Indonesia sudah jauh dari harapan dan keinginan rakyat. Budaya adiluhung tidak berhasil “kawin” dengan politik, dan hanya budaya kepentingan yang paling menarik bagi para ambisius. Urusan rakyat urusan belakangan. Komunikasi politik yang berlangsung hanya formalitas sebagai pelengkap sarana penyalur aspirasi. Realisasi dari aspirasi itu terbata-bata bahkan tertunda tak terbatas waktu. Suasana formal memupus suasana hati. Elite politik seperti jauh dari jangkauan rakyat, dan rakyat pun menjadi tidak peduli apa yang disampaikan para elite. Keadaan ini, selain merusak hubungan antara rakyat dengan pejabat, juga berpengaruh pada kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Rakyat tidak selamanya diam, dan suatu saat dapat meledak tak terbendung. Ini tentu akan merugikan semua pihak, terutama rakyat yang kondisi ekonominya di bawah standar, karena ketidakstabilan politik, biasanya diikuti oleh kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing.

Kesimpulan

Komunikasi politik itu penting dan terasa semakin penting apabila kita menyimak dan menelusuri fungsi komunikasi politik. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat. Dengan terbukanya peluang berkomunikasi, rakyat diajak bicara dan diberi kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran atau ide-ide yang dapat membantu tugas para elite politik. Pembicaraan itu

biasanya dilakukan dengan musyawarah, karena bangsa Indonesia terbiasa hidup dengan budaya kolektif, gotong royong, toleransi, dan solidaritas.

Komunikator politik yang terdiri atas ; politikus, komunikator profesional, dan komunikator aktivis berkewajiban memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai makna politik yang sesungguhnya yang didukung oleh penerapan nilai-nilai budaya lokal sebagai perekat keterkaitan antara tindakan dengan ucapan, dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat atas tindakannya yang dilandasi dengan nilai-nilai budaya tadi, artinya segala tindakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berkembang pada budaya setempat. Terkait dengan keadaan ini, komunikator politik berpeluang besar untuk memainkan perannya sebagai agen perubahan yang dapat membawa kemajuan masyarakat dengan tidak harus meninggalkan budaya sebagai warisan nenek moyang.

Sosialisasi komunikasi politik dilakukan ke berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, agar masyarakat paham mengenai makna dan pentingnya komunikasi politik, dan paham pula segala tindakan komunikator politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak kurang pentingnya adalah masyarakat menjadi lebih paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak yang peduli terhadap usaha mencerdaskan masyarakat di bidang politik.

Tantangan berat dalam komunikasi politik adalah kompleksnya masalah yang mendorong para pelaku politik untuk membuat solusi melalui jalan pintas. Nilai budaya banyak dilabrak dengan dalih modernisasi. Komunikasi politik di Indonesia misalnya, yang sejatinya menjadi sarana penghubung aspirasi masyarakat dan kepentingan pemerintah, berubah menjadi ajang pembentukan partai politik baru, yang berakibat tidak produktifnya para pelaku politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, A.Mappadjantji, 2005. *Kemandirian Lokal*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Cangara, Hafied, 2009. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Firmanzah, 2001. *Mengelola Partai Politik*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia
- McNair, Brian, 2003. *An Introduction to Political Communication*. New York-London : Routledge Taylor & Francis Group
- Nimmo, Dan, 1989. *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media*, penerjemah Tjun Surjaman, Bandung : Remadja Karya
- Radmilla, Samita, 2011. *Kearifan lokal : Benteng Kerukunan*, Jakarta : Gading Inti Prima
- Rosidi, Ajip, 2011. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, Bandung : Kiblat
- Suseno, Franz Magnis, 2003. *Etika Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama